

Jurnal I S E

VOLUME 2 NOMOR 1, APRIL 2012

*Co-operative Autonomy In Indonesia:
A Review*

Adhitya Wardhono

Pengaruh Promosi Terhadap Permintaan Telkom Speedy Di Area Surabaya

Andi Sularso dan Erviana

Dampak Penerapan Model Integrated Agriculture Management Terhadap Masyarakat Pinggiran Hutan Di Kabupaten Jember

Teguh Hari Santoso

Pengaruh Orientasi Pasar dan Karakteristik Pasar Terhadap Strategi Inovasi Dan Kinerja Pemasaran Pada Industri Kosmetik Di Jawa Timur

Abdul Halim

Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Kelompok Petani Tebu Di Desa Gunung Anyar Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso

Moh. Saleh dan Risa Aprilia

A Discourse Of Poverty in Indonesia

Ciplis Gema Qori'ah

Basis Ditinjau Dari Perspektif Teori Kelembagaan Di Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang : Sebuah Pendekatan Kualitatif

Zainuri

Dimensi Kualitas Layanan : Konsep Dan Perkembangannya

Bambang Irawan

Sistem Pengupahan, Karakteristik Individu, Lingkungan Kerja Dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Karyawan Pada UD Tape 82 Di Bondowoso

Budi Nurhardjo dan Moch. Atif Luqman

Pemetaan Potensi Usaha Perdagangan Kabupaten Situbondo

Regina Niken Wilantari

Kajian Dinamika Konversi Lahan Pertanian Kabupaten Jember

Edy Santoso



IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA
CABANG JEMBER

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Jember

ISSN 2089-1482
Volume 2 Nomor 1, April 2012

Ketua Redaksi/Penanggung Jawab
Prof. Dr. H. Moh. Saleh, M.Sc

Sekretaris
Drs. H. Sonny Sumarsono, MM

Editor Ahli
Dr. Siti Komariyah, SE, MSI
Dr. Zainuri, SE. MSI
Dr. Sumantri, SE, MSI
Drs. Hendrawan Santoso P, SE, Msi, Ak

Alamat Redaksi Sekretaris/Redaksi :
Fakultas Ekonomi Universitas Jember
Jl. Kalimantan Kampus No. 37 Tegalboto Jember 68121
Telp. (0331) 337990-Fax (0331) 332150
E-mail : jurnalisei@gmail.com
iesp_jawa@yahoo.com
Website : www.wix.com/unejjember/jurnalisei

Jurnal Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Jember (ISEI-Jember) diterbitkan oleh Alumni Fakultas Ekonomi yang berdomisili di Kabupaten Jember dan sekitarnya, sebagai media profesi ilmiah, penyebaran informasi dan forum pembahasan masalah-masalah Pembangunan Ekonomi.

Terbit 2 (dua) kali setahun setiap bulan Oktober dan April. Penyunting ISEI Jember menerima tulisan yang belum pernah dimuat media lain berupa hasil penelitian, ulasan atas suatu permasalahan Ekonomi atau gagasan orisinal dengan substansi pokok terkait dengan upaya untuk memajukan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Jurnal ISE

VOLUME 2 NOMOR 1

April 2012

*Co-Operative Autonomy In Indonesia:
A Review*

Adhitya Wardhono

Pengaruh Promosi Terhadap Permintaan Telkom Speedy Di Area Surabaya

Andi Sularso dan
Erviana

Dampak Penerapan *Model Integrated Agriculture Management* Terhadap Masyarakat Pinggiran Hutan Di Kabupaten Jember

Teguh Hari Santoso

Pengaruh Orientasi Pasar dan Karakteristik Pasar Terhadap Strategi Inovasi dan Kinerja Pemasaran Pada Industri Kosmetik Di Jawa Timur

Abdul Halim

Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Kelompok Petani Tebu Di Desa Gunung Anyar Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso

Moh. Saleh dan
Risa Aprilia

A Discourse of Poverty in Indonesia

Ciplis Gema Qori'ah

Bazis Ditinjau Dari Perspektif Teori Kelembagaan Di Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang : Sebuah Pendekatan Kualitatif

Zainuri

Dimensi Kualitas Layanan:
Konsep dan Perkembangannya

Bambang Irawan

Sistem Pengupahan, Karakteristik Individu, Lingkungan Kerja Dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Karyawan Pada UD Tape 82 Di Bondowoso

Budi Nurhardjo dan
Moch. Afif Luqman

Pemetaan Potensi Usaha Perdagangan
Kabupaten Situbondo

Regina Niken Wilantari

Kajian Dinamika Konversi Lahan Pertanian
Kabupaten Jember

Edy Santoso



IKATAN SARJANA EKONOMI
INDONESIA
CABANG JEMBER

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Jember



Diterbitkan Oleh:
Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Jember
2012

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Jember

ISSN 2089-1482

VOLUME 2 NOMOR 1 APRIL 2012

DAFTAR ISI

<i>Co-Operative Autonomy In Indonesia: A Review</i> <i>Aditya Wardhono</i>	1 - 8
<i>Pengaruh Promosi Terhadap Permintaan Telkom Speedy Di Area Surabaya</i> <i>Andi Sularso dan Enviara</i>	9 - 28
<i>Dampak Penerapan Model Integrated Agriculture Management Terhadap Masyarakat Pinggiran Hutan Di Kabupaten Jember</i> <i>Teguh Hari Santoso</i>	29 - 42
<i>Pengaruh Orientasi Pasar dan Karakteristik Pasar Terhadap Strategi Inovasi dan Kinerja Pemasaran Pada Industri Kosmetik Di Jawa Timur</i> <i>Abdul Halim</i>	43 - 60
<i>Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Kelompok Petani Tebu Di Desa Gunung Anyar Kecamatan Tapan Kabupaten Bondowoso</i> <i>Moh. Saleh dan Risa Aprilia</i>	61 - 72
<i>A Discourse of Poverty in Indonesia</i> <i>Cipti Gema Qor'iah</i>	73-86
<i>Bazis Ditinjau Dari Perspektif Teori Kelembagaan Di Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang : Sebuah Pendekatan Kualitatif</i> <i>Zainuri</i>	87 - 94
<i>Dimensi Kualitas Layanan: Konsep dan Perkembangannya</i> <i>Bambang Irawan</i>	95 - 108
<i>Sistem Pengupahan, Karakteristik Individu, Lingkungan Kerja Dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Karyawan Pada UD Tape 82 Di Bondowoso</i> <i>Budi Nurhardjo dan Moch. Affi Luqman</i>	109 - 122
<i>Pemetaan Potensi Usaha Perdagangan Kabupaten Situbondo</i> <i>Regina Niken Wilontari</i>	123 - 138
<i>Kajian Dinamika Konversi Lahan Pertanian Kabupaten Jember</i> <i>Edy Santoso</i>	139 - 156

KAJIAN DINAMIKA KONVERSI LAHAN PERTANIAN KABUPATEN JEMBER

(DYNAMICS STUDY OF CONVERSION OF AGRICULTURAL LAND
DISTRICT JEMBER)

Edy Santoso

Staf pengajar pada Jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
Jl. Kalimantan No 37 Jember Telp. 0331 337990/Fax. 332150/HP 08125230743

Abstract

This study attempts to examine further the phenomenon of conversion of land to identify land conversion that occurred in Jember and analyze the spatial patterns of land conversion and related policies. The variables studied were the pattern and rate of conversion of farmland to non agriculture. The method used is descriptive analysis method comparison between the patterns of land use, patterns and trends of land use change. While the survey data collection method that uses some of the research instruments, including questionnaires, interviews, observation and document review. The results showed that the trend of conversion of agricultural land (paddy) to non-agricultural use in the region in the period 2005-2008 Jember macro dynamics occur in the context of rapid urban growth in urban districts, namely District Patrang, Kaliwates District, and District Sumbarsari. In the period 2005-2008 in Jember wetland area showed contraction of 197.55 ha, or 65.85 ha / year. While the increase in housing allocation of 80.39 ha / year. Overall average change in the allotment of rice to non-agricultural land during the years 2005 - 2008 average per sub 2.12 ha / year. Judging from the spatial distribution patterns, the trend of wetland conversion to non agricultural use on uneven Jember in all districts, be assessed based on the extent and rate of depreciation, depreciation area district that has a relatively large wetland once the depreciation rate is very high agricultural land is sub Kaliwates and Patrang. District with a high conversion rate is Sumbarsari and Pakesari District. While districts with high conversion rates, among others: District Puger, Drupal, Silo, Ajung, Levees, and Bangsalsari. Based on the distribution of its location, it appears that the shrinkage of the wetland and a high rate of shrinkage is concentrated around the city districts that are currently experiencing unprecedented growth.

Key words: land conversion, agricultural, non agricultural, spatial patterns, the rate of depreciation

1. Pendahuluan

Perubahan struktur Perekonomian Indonesia sejak tahun 1970-an merupakan fenomena yang semakin jelas akan mewarnai era Pembangunan Jangka Panjang menghadapi era keterbukaan ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini di cirikan oleh penurunan pangsa relatif sektor pertanian pada Produk Domestik Bruto (PDB) dari kira-kira 45,5% pada akhir tahun 1960-an menjadi 21,1% dewasa ini. Sumbangan sub sektor tanaman padi menunjukkan pangsaanya terhadap PDB 19,0% pada awal Pelita 1 menurun menjadi 6,5% pada tahun 2007. Dilihat dari data penyerapan tenaga kerja Nasional sub

sektor tanaman pangan menyerup 73,3% pada tahun 1961, menurun menjadi 36,4% pada tahun 2005.

Proses perubahan struktural tersebut harus dilakukan, apabila diinginkan pertumbuhan ekonomi yang memberi dampak terhadap pendapatan dalam masyarakat. Perubahan struktural tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sehingga memungkinkan terjadinya proses transformasi pekerja dari sektor pertanian ke non pertanian. Terjadinya perubahan struktural akan memberi tekanan kepada permintaan lahan di luar sektor pertanian, khususnya lahan-lahan pertanian yang berdekatan dengan kawasan perkotaan. Kebanyakan kota besar di Indonesia mempunyai hinterland lahan sawah, dan lahan sawah mempunyai akses yang lebih baik ke kawasan perkotaan. Seperti diketahui proses perubahan struktural yang tercermin dari pertumbuhan sektor-sektor strategis seperti industri, jasa maupun perdagangan, umumnya dimulai dari kawasan kota. Sehingga dengan terjadinya perubahan struktural akan memperbesar proses alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian.

Ketersediaan lahan total secara teori adalah tetap di suatu wilayah, sedang permintaan terus bertambah dengan cepat terutama di sekitar kawasan perkotaan. Hal ini didorong oleh pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan, dan migrasi dari wilayah lain maupun wilayah hinterland kota di wilayah yang bersangkutan (urbanisasi). Pola tata guna lahan tersebut mengarah kepada aktivitas-aktivitas yang paling menguntungkan sehingga harganya cenderung meningkat. Meningkatnya harga lahan tersebut dapat menjadi pendorong bagi pemilik uang untuk membeli lahan dengan maksud spekulasi atau untuk menabung. Konversi lahan sawah yang semakin cepat dan meluas merupakan salah satu dampak tekanan terhadap lahan sawah.

Pendekataan makro atau spasial dan pendekatan mikro atau teori lokasi digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan makro mengasumsikan bahwa perencana pembangunan wilayah sebagai pengambil keputusan lokasi lahan, misalnya melalui perencanaan. Pendekataan mikro mengasumsikan bahwa keputusan dilakukan oleh perusahaan atau konsumen. Penentu alokasi lahan termasuk lahan sawah adalah tarik menarik kepentingan efisiensi produsen (maksimisasi keuntungan), efisiensi konsumen (maksimisasi kepuasan), dan efisiensi pelayanan (maksimisasi kesejahteraan masyarakat).

Secara teoritis pertumbuhan penduduk bersama-sama dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi melalui proses aglomerasi di kota termasuk kota Jember akan mengakibatkan terjadinya perkembangan wilayah dari pusat pertumbuhan ke wilayah hinterland. Pertumbuhan penduduk bisa terjadi karena faktor alamiah yakni kelahiran hingga ke proses urbanisasi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya urbanisasi bisa terjadi karena faktor dorongan dari daerah asal atau tarikan dari kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Dorongan dari tempat asal yang umumnya bisa kawasan hinterland, bisa berupa faktor ekonomi maupun non ekonomi, sedang yang sifatnya sebagai faktor penarik, salah satunya juga bersifat ekonomi atau non ekonomi.

Terjadinya pertumbuhan penduduk yang signifikan akan membutuhkan berbagai fasilitas baik publik maupun privat. Faktor inilah yang menjadi faktor permintaan lahan baru, sebagai pemicu terjadinya realokasi lahan baik fungsi hingga ke struktur kepemilikan atau penguasaan lahan. Hal ini terjadi karena luasan lahan yang tetap. Di lain pihak pertumbuhan aktivitas ekonomi bisa menjadi salah satu faktor terjadinya proses realokasi perkembangan wilayah, yang juga berakibat realokasi lahan. Hal ini juga terjadi karena proses aglomerasi ekonomi dan sosial.

Penelitian tentang konversi lahan sawah serta dinamikanya ini diadakan di Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru dan menghasilkan implikasi kebijakan yang mampu menyeimbangkan permasalahan tata guna lahan khususnya di kota Jember, khususnya tentang evaluasi

dinamika konversi lahan sawah ke non pertanian, serta dampaknya terhadap ekonomi wilayah.

2. Tujuan Penelitian

- Tujuan penelitian konversi lahan pertanian ini, adalah:
- Mengidentifikasi perkembangan konversi lahan pertanian dilihat dari luasan, peruntukan, dan pola konversi;
 - Mengidentifikasi permasalahan konversi lahan pertanian;
 - Mengetahui implikasi perkembangan konversi lahan pertanian dilihat dari pola dan struktur tata ruang;
 - Penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah yang terkait dengan konversi lahan pertanian di Kabupaten Jember.

3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskripsi komparasi. Penelitian ini lebih memfokuskan pada upaya diskripsi secara mendalam tentang dinamika konversi lahan pertanian di Kabupaten Jember. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pola perubahan tata guna lahan. Dalam hal ini lahan sebagai salah satu sektor produksi akan diasumsikan mempunyai mobilitas yang cukup tinggi, tergantung harapan perolehan *land rent* nya, yang secara teratur setiap waktu bisa berubah, bisa musiman atau tahunan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah dinamika perubahan tata guna lahan (konversi) di wilayah Kabupaten Jember, yang meliputi 31 kecamatan dengan sampel waktu yang diambil adalah tahun 2005 s./d. 2008.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung di lapangan dari beberapa narasumber yang memahami betul tentang dinamika konversi lahan di Kabupaten Jember. Data tersebut berguna sebagai referensi pokok dalam upaya mempertajam dan memperkaya analisis data sekunder. Sedangkan data sekunder diperoleh Badan Pertanahan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan studi pustaka yang berupa hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkait dengan penelitian ini.

Untuk menjawab 4 (empat) tujuan kajian ini dipakai analisis diskriptif komparasi pola peruntukan lahan antar waktu, dengan pola dan kecenderungan perubahan peruntukan lahan tersebut. Demikian juga untuk memahami permasalahan maupun implikasi hasil kajian, yaitu berupa kebijakan mendasar dalam upaya pengendalian dan penyempurnaan peruntukan lahan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkembangan pembangunan akan mempengaruhi perubahan kondisi lahan. Penggunaan lahan dapat diartikan secara umum sebagai aktivitas manusia atas lahan. *British Columbia* (1986) menjelaskan penggunaan lahan sebagai kombinasi spesifik antara tutupan lahan (*land cover*) dan aktivitas lahan (*land activity*). Aktivitas lahan didasarkan atas adanya aktivitas manusia dalam rangka pemanfaatan lahan. Sedangkan tutupan lahan didasarkan pada penggunaan lahan yang terjadi secara alamiah tanpa terlebih dulu ada campur tangan manusia seperti sungai, laut hutan alami dan lain-lain.

Informasi penggunaan lahan ini sangat diperlukan, terutama informasi mengenai jenis penggunaan, sebaran dan luasannya. Dengan informasi tersebut dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dan pembuatan perencanaan pembangunan berkenaan dengan pemanfaatan lahan.

Ketersediaan lahan total secara teori adalah tetap di suatu wilayah, sedang permintaan terus bertambah dengan cepat terutama di sekitar kawasan perkotaan. Hal ini didorong oleh pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan, dan migrasi dari wilayah lain maupun wilayah *hinterland* kota di wilayah yang bersangkutan (urbanisasi). Pola tata guna lahan tersebut mengarah kepada aktivitas-aktivitas yang paling menguntungkan sehingga harganya cenderung meningkat. Meningkatnya harga lahan tersebut dapat menjadi pendorong bagi pemilik uang untuk membeli lahan dengan maksud spekulasi atau untuk menabung. Konversi lahan sawah yang semakin cepat dan meluas merupakan salah satu dampak tekanan terhadap lahan sawah.

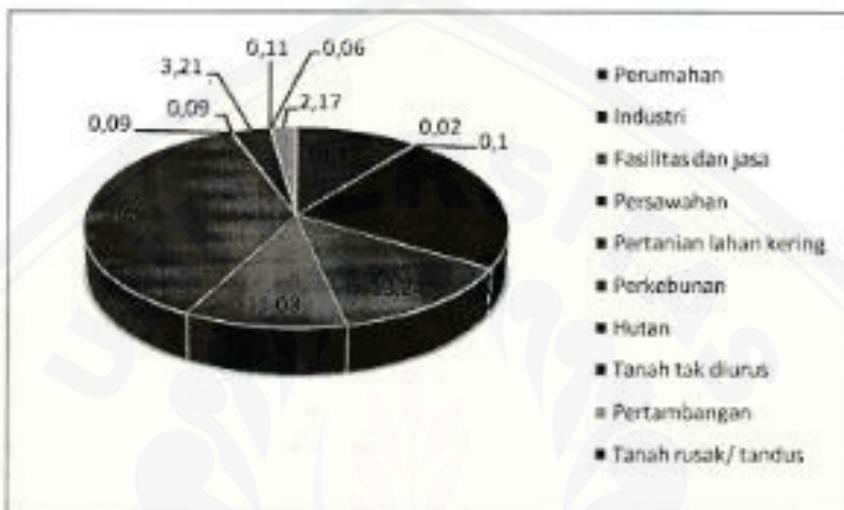
Pendekataan makro atau spasial dan pendekatan mikro atau teori lokasi digunakan dalam penelitian ini. Pendekataan makro mengasumsikan bahwa perencanaan pembangunan wilayah sebagai pengambil keputusan lokasi lahan, misalnya melalui perencanaan. Pendekataan mikro mengasumsikan bahwa keputusan dilakukan oleh perusahaan atau konsumen. Penentu alokasi lahan termasuk lahan sawah adalah tarik menarik kepentingan efisiensi produsen (maksimisasi keuntungan), efisiensi konsumen (maksimisasi kepuasan), dan efisiensi pelayanan (maksimisasi kesejahteraan).

Secara teoritis alokasi pemanfaatan lahan dapat dilaksanakan melalui beberapa mekanisme, antara lain : (1) penataan ruang oleh pemerintah melalui undang-undang, (2) melalui mekanisme pasar, dan (3) kombinasi antara pengaturan pemerintah dan mekanisme pasar. Menurut Sarwono dan Nasoetion (1990), ketiga jenis mekanisme tersebut mempunyai kekuatan dan kelemahan. Mekanisme pertama memerlukan pangkalan data yang menyeluruh, akurat serta sistem managemen yang efisien dan hierarkhi pengambilan keputusan yang tidak ambiguous. Kekuatan sistem ini adalah pencapaian tujuan penataan lahan dapat dilakukan secara lebih terkendali, umumnya membutuhkan biaya yang relatif besar. Sebaliknya melalui mekanisme pasar alokasi ruang (lahan) biaya formalnya relatif kecil, tetapi ditinjau dari titik pandang masyarakat mekanisme pasar cenderung mengakibatkan missalokasi sumber daya lahan.

Terjadinya pertumbuhan penduduk yang signifikan akan membutuhkan berbagai fasilitas baik publik maupun privat. Faktor inilah yang menjadi faktor permintaan lahan baru, sebagai pemicu terjadinya realokasi lahan baik fungsi hingga ke struktur kepemilikan atau penguasaan lahan. Hal ini terjadi karena luasan lahan yang tetap. Di lain pihak pertumbuhan aktivitas ekonomi bisa menjadi salah satu faktor terjadinya proses realokasi perkembangan wilayah, yang juga berakibat realokasi lahan. Hal ini juga terjadi karena proses aglomerasi ekonomi dan sosial.

4.1 Distribusi Perubahan Penggunaan Lahan Kabupaten Jember

Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, proporsi penggunaan lahan Kabupaten Jember peruntukan hutan merupakan penggunaan lahan yang paling besar, dengan porsi 36,63 persen. Disusul penggunaan lahan untuk persawahan dengan porsi sebesar 22,70 persen, dan pertanian tanah kering (tegal) sebesar 13,24 persen. Alokasi penggunaan lahan untuk perumahan berkembang dengan cepat, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan tingkat ekonomi masyarakat.



Grafik 1.
Rata-rata Penggunaan Lahan di Kabupaten Jember 2005 - 2008 (%)

Secara teoritis konversi lahan sawah ke non pertanian oleh petani secara langsung dipengaruhi kondisi sosial ekonomi pertanian, seperti tingkat pendidikan, umur, jumlah anggota keluarga, banyaknya tanggungan keluarga, luas pemilikan lahan, sebaran sawah, proporsi pendapatan pertanian terhadap non pertanian, kemampuan ekonomi dan harga lahan sawah. Sebagian konversi lahan sawah tidak dilakukan secara langsung oleh petani tetapi oleh pihak lain yaitu pembeli, sehingga proses konversi lahan sawah lewat proses jual beli (hak milik atau penguasaan lahan). Hampir 70% proses jual beli lahan sawah melibatkan pemerintah, yaitu berupa izin lokasi dan izin pembebasan.

Tabel 1. Distribusi Penggunaan Lahan Kabupaten Jember (dalam ha)

No	Keterangan	2005	2006	2007	2008	Rerata	Porsi
1	Perumahan	34.427,41	34.550,20	34.598,22	34.668,56	34.561,10	10,49
2	Industri	61,29	61,29	61,29	63,65	61,88	0,02
3	Fasilitas dan Jasa	322,39	330,50	335,27	343,44	332,90	0,10
4	Persawahan Pertanian Tanah Kering	74.884,13	74.766,67	74.713,88	74.686,58	74.762,82	22,70
5		43.633,58	43.619,94	43.619,94	43.601,10	43.618,64	13,24
6	Perkebunan	35.119,47	35.119,47	35.119,47	40.619,47	36.494,47	11,08
7	Hutan	120.619,61	120.619,61	120.619,61	120.619,61	120.619,61	36,63
8	Tanah Tak Dicurus	305,19	305,19	305,19	305,19	305,19	0,09
9	Pertambangan	289,00	289,00	289,00	289,00	289,00	0,09
10	Tanah Rasaik/Tundus	11.969,31	11.969,31	11.969,31	6.434,60	10.585,63	3,21
11	Tambak/Kolam	359,16	359,16	359,16	359,16	359,16	0,11
12	Waduk/Sungai/Jln	210,93	210,93	210,93	210,93	210,93	0,06
13	Lain-lain	7.132,47	7.132,67	7.132,67	7.132,65	7.132,61	2,17

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, 2009

Umumnya Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) juga lebih banyak tidak transparan, sehingga kebijaksanaan zoning sering terlambat diketahui petani dan didahului oleh spekulasi tanah. Ketidakjelasan aturan main, batas pemilikan, informasi yang tidak seimbang hingga berbagai tindakan ilegal merupakan bentuk intervensi faktor kekuasaan yang cenderung merugikan pihak yang lemah yaitu petani. Harga lahan dan besarnya pajak lahan sawah yang berkorelasi positif terhadap peluang konversi, mengisyaratkan perlunya perangkat kebijaksanaan yang transparan mengenai lahan sawah, khususnya kebijaksanaan harga lahan atau sistem kompensasi yang adil.

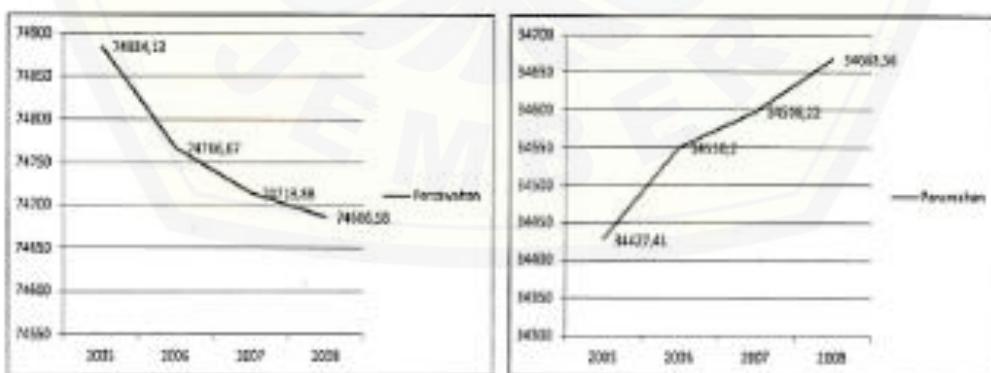
Aturan harga yang jelas dan transparan sangat diperlukan oleh kawasan yang akan dikonversi sehingga sedikit banyak akan melindungi petani kecil. Kondisi yang tidak transparan hanya akan menguntungkan petani yang kuat saja bahkan ikut memperoleh manfaat. Upaya pemerintah untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah ke penggunaan non pertanian, dilakukan dengan mengeluarkan beberapa peraturan dan undang-undang. Namun, peraturan yang ada tersebut cenderung hanya melarang tanpa memberikan alternatif pemecahan, sementara upaya pengembangan untuk memenuhi kebutuhan akan ruang terpaksa dilakukan di areal sawah, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih rasional dan operasional sifatnya.

Tabel 2. Perubahan Penggunaan Lahan Kabupaten Jember

No	Keterangan	2005-2006	2006-2007	2007-2008	Rerata
1	Perumahan	122,79	48,02	70,34	80,39
2	Industri	0,00	0,00	2,36	0,79
3	Fasilitas dan Jasa	8,11	4,77	8,16	7,01
4	Persawahan	- 117,46	- 52,79	- 27,30	- 65,85
5	Pertanian Tanah Kering	- 13,64	0,00	- 18,84	- 10,83
6	Perkebunan	0,00	0,00	5.500,00	1.833,33
7	Hutan	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tanah Tak Diurus	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pertambangan	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tanah Rusak/Tandus	0,00	0,00	- 5.534,71	- 1.844,90
11	Tambak/Kolam	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Waduk/Sungai/Jln	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Lain-lain	0,20	0,00	- 0,02	0,06

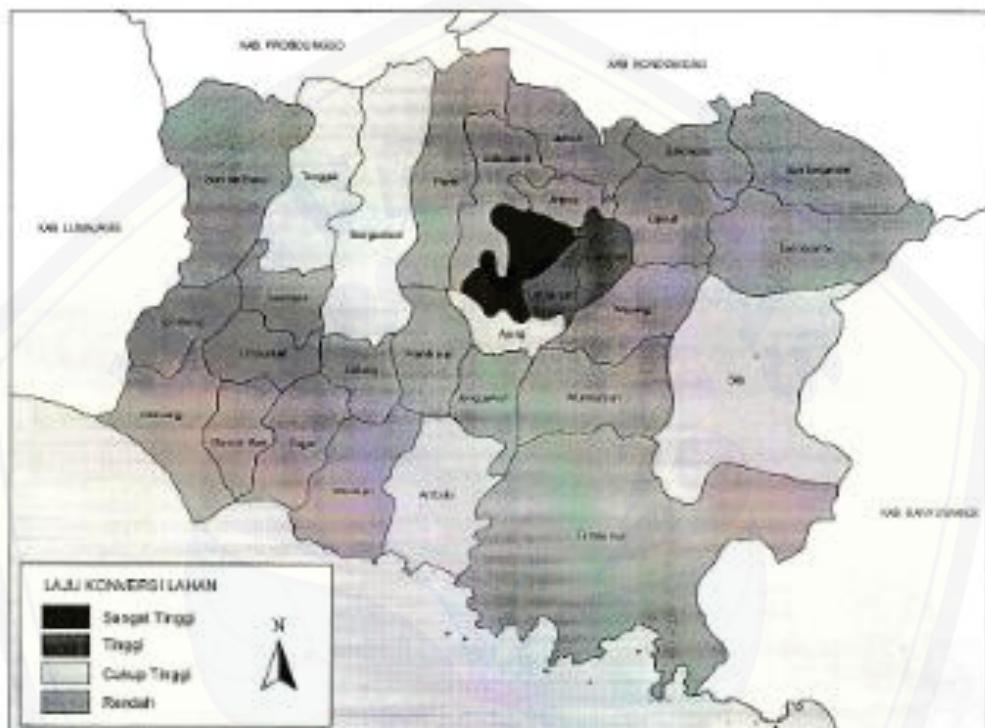
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, 2009

Berdasarkan hasil survei menunjukkan tingkat pengurangan lahan persawahan Kabupaten Jember, selama tahun 2005 – 2008 rata-rata 65,85 ha/tahun. Sedangkan peningkatan peruntukan perumahan sebesar 80,39 ha/tahun. Secara keseluruhan rata-rata perubahan peruntukan lahan persawahan ke non pertanian selama tahun 2005 – 2008 rata-rata per kecamatan 2,12 ha/tahun. Hasil perhitungan memperlihatkan beberapa kecamatan dengan laju konversi yang sangat tinggi, namun ada beberapa kecamatan tidak terjadi konversi (perubahan peruntukan) persawahan ke non pertanian.



Grafik 2
Perkembangan Penggunaan Lahan Persawahan dan Perumahan 2005-2008 (Ha)

Beberapa kemungkinan penyebab tidak terjadinya konversi, adalah *pertama* dasar data yang digunakan, dimana dasar analisis Kantor Pertanahan adalah surat ijin yang diajukan kepada Kantor tersebut, sehingga apabila tidak melakukan perijinan maka tidak akan terdeteksi. *Kedua*, ada perubahan namun dengan tingkat yang sangat kecil, sehingga tidak terekam. *Ketiga*, memang tidak terjadi perubahan peruntukan lahan dari persawahan ke non pertanian.



Gambar 1.
Peta Konversi Lahan Pertanian Kabupaten Jember menurut Kecamatan

Beberapa kecamatan yang tidak mengalami konversi lahan pertanian, adalah Kecamatan Sumberbaru, Ledokombo, Umbulsari, dan Mumbulsari. Sementara kecamatan dengan tingkat konversi pertanian yang sangat/paling tinggi adalah Kecamatan Kaliwates dengan tingkat konversi rata-rata sebesar 45,87 ha/tahun. Kecamatan dengan laju konversi diatas rata-rata (2,12 ha/tahun) adalah Kecamatan Patrang, Pakusari, dan Sumberbaru, dengan tingkat konversi masing-masing sebesar 4,22 ha/tahun, 3,55 ha/tahun, dan 3,78 ha/tahun. Konversi lahan pertanian tertinggi terjadi pada tahun 2005-2006 dengan tingkat konversi sebesar 117,46 ha/tahun, atau rata-rata perkecamatan sebesar 3,79 ha/tahun.

Tabel 3. Konversi Lahan Pertanian Kabupaten Jember menurut Kecamatan (%)

No	Kecamatan	2005-2006	2006-2007	2007-2008	Rerata
1	Kencong	-0,21	-0,29	-0,05	-0,19
2	Jombang	-0,07	0,00	-0,13	-0,07
3	Gumukmas	-0,55	-0,09	0,00	-0,21
4	Puger	-1,30	0,00	-2,09	-1,13
5	Wuluhan	0,00	0,00	-0,14	-0,05
6	Ambulu	-0,88	-0,14	-0,53	-0,52
7	Tempurejo	0,00	-0,29	-1,04	-0,44
8	Silo	-0,13	0,00	-1,98	-0,70
9	Mayang	-0,33	0,00	0,00	-0,11
10	Mumbulsari	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Jenggawah	-0,59	-0,25	-0,34	-0,39
12	Ajung	-0,13	-0,74	-0,82	-0,57
13	Sukorambi	-0,41	0,00	-0,23	-0,21
14	Rambipuji	-0,74	-0,12	-0,23	-0,36
15	Balung	-0,63	-0,47	-0,35	-0,49
16	Umbulsari	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sumberbaru	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tanggul	-1,52	0,00	-0,16	-0,56
19	Semboro	-0,09	0,00	0,00	-0,03
20	Bangsalsari	-2,06	-0,50	-0,02	-0,86
21	Panti	0,00	-0,15	-0,45	-0,20
22	Arjasa	-0,14	-1,15	0,00	-0,43
23	Jelbuk	0,00	0,00	-0,03	-0,01
24	Pakusari	-4,15	-0,30	-6,19	-3,55
25	Kalisat	-0,61	-0,23	-0,22	-0,35
26	Sukowono	-0,41	0,00	-0,70	-0,37
27	Ledokombo	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Sumberjambe	0,00	0,00	-0,57	-0,19
29	Sumbersari	-4,47	-4,70	-2,17	-3,78
30	Kaliwates	-91,33	-39,46	-6,80	-45,87
31	Patrang	-6,71	-3,91	-2,04	-4,22
	Jumlah	-117,46	-52,79	-27,30	-2,12

Sumber: Hasil Analisis

Pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan permintaan akan perumahan. Peningkatan peruntukan perumahan Kabupaten Jember selama tahun 2005 - 2008 sebesar 80,39 ha/tahun, atau rata-rata perkecamatan adalah 2,59 ha/tahun. Berdasarkan data, menunjukkan beberapa kecamatan tidak mengalami peningkatan penggunaan lahan untuk perumahan, disebabkan. Kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Ledokombo, Sumberjambe, Umbulsari, Sumberbaru, dan Mayang. Sementara kecamatan dengan penambahan peruntukan perumahan yang sangat/paling tinggi adalah Kecamatan Kaliwates dengan tingkat penambahan rata-rata sebesar 46,03 ha/tahun. Sedangkan kecamatan dengan laju konversi diatas rata-rata (2,59 ha/tahun) adalah

Kecamatan Patrang, Pakusari, Puger dan Sumbersari, dengan tingkat konversi masing-masing sebesar 3,62 ha/tahun, 3,55 ha/tahun, 12,40 ha/tahun, dan 8,82 ha/tahun.

Peningkatan peruntukan tertinggi terjadi pada tahun 2005-2006, dimana total perubahan lahan untuk perumahan sebesar 122,79 ha/tahun. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa, Kecamatan Kaliwates merupakan kecamatan dengan tingkat penambahan yang paling besar, yaitu 97,90 ha/tahun. Disusul Kecamatan Patrang, Sumbersari, dan Pakusari, dengan tingkat penambahan sebesar 6,61 ha/tahun, 4,31 ha/tahun, dan 4,15 ha/tahun.

Tabel 4. Peruntukan Perumahan Kabupaten Jember menurut Kecamatan (%)

No	Kecamatan	2005-2006	2006-2007	2007-2008	Rerata
1	Kencong	0,62	0,29	0,00	0,30
2	Jombang	0,07	0,00	0,13	0,07
3	Gumukmas	0,55	0,09	0,00	0,21
4	Puger	1,30	0,00	35,89	12,40
5	Wuluhan	0,00	0,00	0,14	0,05
6	Ambulu	0,85	0,14	0,53	0,51
7	Tempurejo	0,00	0,06	1,04	0,36
8	Silo	0,13	0,00	0,02	0,05
9	Mayang	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Mumbulsari	0,00	0,00	-0,40	-0,13
11	Jenggawah	0,59	0,00	0,34	0,31
12	Ajung	0,13	0,74	0,82	0,57
13	Sukorambi	0,41	0,00	0,23	0,21
14	Rambipuji	0,06	0,00	0,23	0,10
15	Balung	0,35	0,00	0,35	0,23
16	Umbulsari	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sumberbaru	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tanggul	1,52	0,00	0,07	0,53
19	Semboro	0,09	0,00	0,00	0,03
20	Bangsalsari	2,02	0,50	0,00	0,84
21	Panti	0,00	0,15	0,44	0,20
22	Arjasa	0,14	1,15	0,40	0,56
23	Jelbuk	0,00	0,00	1,31	0,44
24	Pakusari	4,15	0,30	6,19	3,55
25	Kalisat	0,61	0,23	0,00	0,28
26	Sukowono	0,38	0,00	0,35	0,25
27	Ledokombo	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Sumberjambe	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sumbersari	4,31	4,05	18,12	8,82
30	Kaliwates	97,90	36,42	3,78	46,03
31	Patrang	6,61	3,91	0,35	3,62
	Jumlah	122,79	48,02	70,34	2,59

Sumber: Hasil Analisis

4.2 Distribusi Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan

4.2.1 Kecamatan Sumbersari

Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, porsi terbesar penggunaan lahan Kecamatan Sumbersari merupakan areal perumahan. Luas areal perumahan Kecamatan Sumbersari mencapai 1.562,01 ha atau mencapai 42,16 persen dari areal keseluruhan. Peruntukan lahan terbesar kedua adalah berupa persawahan, mencapai areal 1.559,75 ha atau 42,10 persen. Sedangkan peruntukan lahan pertanian tanah kering mencapai luasan terbesar ketiga, dengan areal mencapai 300,29 ha atau 8,11 persen.

Distribusi penggunaan lahan fasilitas/jasa mencapai 204,23 ha atau 5,51 persen dari keseluruhan peruntukan lahan. Kemudian penggunaan lahan lain-lain, mencapai 60,78 ha atau 1,64 persen. Sedangkan sisanya sebesar 17,70 ha atau 0,48 persen berupa penggunaan lahan industri. Untuk Kecamatan Sumbersari tidak terdapat peruntukan lahan sebagai perkebunan, pertambangan, hutan, tanah tak diurus, tanah rusak/tandus, tambak/kolam, dan waduk/sungai/jalan. Secara detail distribusi penggunaan lahan Kecamatan Sumbersari, dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Distribusi Penggunaan Lahan Kecamatan Sumbersari

No	Keterangan	2005	2006	2007	2008	Rerata	Persi
1	Perumahan	1.552,23	1.556,54	1.560,59	1.578,70	1.562,01	42,16
2	Industri	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	0,48
3	Fasilitas dan Jasa	203,77	203,93	204,50	204,64	204,23	5,51
4	Persawahan Pertanian Tanah Kering	1.566,00	1.561,53	1.556,82	1.554,65	1.559,75	42,10
5	Perkebunan	304,29	304,29	304,29	288,29	300,29	8,11
6	Hutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tanah Tak Diurus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pertambangan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rusak/Tandus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tambak/Kolam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Waduk/Sungai/Jln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Lain-lain	60,78	60,78	60,78	60,78	60,78	1,64

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, 2009

Hasil perhitungan menunjukkan, selama periode 2005-2008 terjadi konversi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Sumbersari rata-rata sebesar 3,78 ha/tahun. Selain persawahan, juga terjadi perubahan pada pertanian tanah kering dengan tingkat perubahan rata-rata sebesar 5,33 ha/tahun. Perubahan peruntukan tersebut digunakan untuk keperluan perumahan sebesar rata-rata 8,82 ha/tahun, dan fasilitas/jasa sebesar rata-rata 0,29 ha/tahun. Konversi lahan pertanian terbesar terjadi pada periode 2007-2008, yaitu sebesar 18,12 ha. Secara rinci perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Sumbersari, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Sumbersari

No	Keterangan	2005-2006	2006-2007	2007-2008	Rerata
1	Perumahan	4,31	4,05	18,12	8,82
2	Industri	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Fasilitas dan Jasa	0,16	0,65	0,06	0,29
4	Persawahan Pertanian Tnh	-4,47	-4,70	-2,17	-3,78
5	Kering	0,00	0,00	-16,00	-5,33
6	Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Hutan	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tanah Tak Diurus	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pertambangan	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tnh Rusak/Tandus	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Tambak/Kolam	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Waduk/Sungai/Jln	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Hasil Analisis

4.2.2 Kecamatan Kaliwates

Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, porsi terbesar penggunaan lahan Kecamatan Kaliwates merupakan areal perumahan. Luas areal perumahan Kecamatan Kaliwates mencapai 1.440,94 ha atau mencapai 57,78 persen dari areal keseluruhan. Peruntukan lahan terbesar kedua adalah berupa persawahan, mencapai areal 881,80 ha atau 35,36 persen. Sedangkan peruntukan lahan pertanian tanah kering mencapai luasan terbesar ketiga, dengan areal mencapai 65,60 ha atau 2,63 persen.

Distribusi penggunaan lahan lainnya mencapai 58,79 ha atau 2,36 persen dari keseluruhan peruntukan lahan. Kemudian penggunaan lahan fasilitas dan jasa, mencapai 32,55 ha atau 1,31 persen. Sedangkan sisanya sebesar 13,98 ha atau 0,56 persen berupa penggunaan lahan untuk industri. Untuk Kecamatan Kaliwates tidak terdapat peruntukan lahan sebagai perkebunan, tanah tak diurus, tanah rusak/tandus, pertambangan, hutan, tambak/kolam, dan waduk/sungai/jalan. Secara detail distribusi penggunaan lahan Kecamatan Kaliwates, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Distribusi Penggunaan Lahan Kecamatan Kaliwates

No	Keterangan	2005	2006	2007	2008	Rerata	Porsi
1	Perumahan	1.348,36	1.446,26	1.482,68	1.486,45	1.440,94	57,78
2	Industri	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	0,56
3	Fasilitas dan Jasa	25,12	31,99	35,04	38,06	32,55	1,31
4	Persawahan	971,73	880,40	840,93	834,13	881,80	35,36
5	Pertanian Tanah Kering	75,68	62,24	62,24	62,24	65,60	2,63
6	Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Hutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tanah Tak Diurus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pertambangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tnh						
11	Rusak/Tandus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Tambak/Kolam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Waduk/Sungai/Jln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain	58,79	58,79	58,79	58,79	58,79	2,36

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, 2009

Hasil perhitungan menunjukkan, selama periode 2005-2008 terjadi konversi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Kaliwates rata-rata sebesar 45,87 ha/tahun, dan pertanian tanah kering ke non pertanian sebesar 4,48 ha/tahun.. Perubahan peruntukan tersebut digunakan untuk keperluan perumahan sebesar 46,03 dan fasilitas/jasa sebesar 4,31 ha/tahun. Konversi lahan pertanian terbesar terjadi pada periode 2005-2006, yaitu sebesar 97,90 ha. Secara rinci perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Kaliwates, dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Kaliwates

No	Keterangan	2005-2006	2006-2007	2007-2008	Rerata
1	Perumahan	97,90	36,42	3,78	46,03
2	Industri	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Fasilitas dan Jasa	6,87	3,04	3,02	4,31
4	Persawahan	-91,33	-39,46	-6,80	-45,87
5	Pertanian Tnh Kering	-13,44	0,00	0,00	-4,48
6	Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Hutan	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tanah Tak Diurus	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pertambangan	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tnh Rusak/Tandus	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Tambak/Kolam	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Waduk/Sungai/Jln	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Hasil Analisis

4.2.3 Kecamatan Patrang

Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, porsi terbesar penggunaan lahan Kecamatan Patrang merupakan areal persawahan. Luas areal persawahan Kecamatan Patrang mencapai 1.627,85 ha atau mencapai 43,98 persen dari areal keseluruhan. Peruntukan lahan terbesar kedua adalah berupa perumahan, mencapai areal 986,46 ha atau 26,67 persen. Sedangkan peruntukan lahan pertanian tanah kering mencapai luasan terbesar ketiga, dengan areal mencapai 975,83 ha atau 26,38 persen.

Distribusi penggunaan lahan lainnya mencapai 77,88 ha atau 2,11 persen dari keseluruhan peruntukan lahan. Kemudian penggunaan lahan fasilitas/jasa, mencapai 31,54 ha atau 0,85 persen. Sedangkan sisanya sebesar 0,69 ha atau 0,02 persen berupa lahan industri. Untuk Kecamatan Patrang tidak terdapat peruntukan lahan sebagai perkebunan, pertambangan, hutan, tanah tak diurus, tanah rusak/tandus tambak/kolam, dan waduk/sungai/jalan. Secara detail distribusi penggunaan lahan Kecamatan Patrang, dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Distribusi Penggunaan Lahan Kecamatan Patrang

No	Keterangan	2005	2006	2007	2008	Rerata	Porsi
1	Perumahan	979,47	986,08	989,98	990,33	986,46	26,67
2	Industri	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,02
3	Fasilitas dan Jasa	31,04	31,13	31,13	32,85	31,54	0,85
4	Persawahan Pertanian Tnh	1.634,50	1.627,79	1.623,89	1.621,85	1.627,01	43,98
5	Kering	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	26,38
6	Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Hutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tanah Tak Diurus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pertambangan Tnh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rusak/Tandus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Tambak/Kolam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Waduk/Sungai/Jln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Lain-lain	77,88	77,88	77,88	77,86	77,88	2,11

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, 2009

Hasil perhitungan menunjukkan, selama periode 2005-2008 terjadi konversi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Patrang rata-rata sebesar 4,22 ha/tahun. Perubahan peruntukan tersebut digunakan untuk keperluan perumahan, dan fasilitas/jasa. Konversi lahan pertanian terbesar terjadi pada periode 2005-2006, yaitu sebesar 6,61 ha. Secara rinci perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Patrang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Patrang

No	Keterangan	2005-2006	2006-2007	2007-2008	Rerata
1	Perumahan	6,61	3,91	0,35	3,62
2	Industri	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Fasilitas dan Jasa	0,10	0,00	1,72	0,61
4	Persawahan	-6,71	-3,91	-2,04	-4,22
	Pertanian Tnh				
5	Kering	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Hutan	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tanah Tak Diurus	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pertambangan	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tnh Rusak/Tandus	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Tambak/Kolam	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Waduk/Sungai/Jln	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Lain-lain	0,00	0,00	-0,022	-0,01

Sumber: Hasil Analisis

5. Kesimpulan

Hasil penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan penting yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

- a) Pola penggunaan lahan di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa proporsi peruntukan hutan merupakan porsi terbesar dibandingkan dengan peruntukan yang lain yaitu 120.619,61 atau 36,63 persen. Disusul dengan penggunaan lahan untuk persawahan dengan luas 74.762,82 atau 22,70 persen dari total penggunaan lahan keseluruhan. Kemudian pertanian tanah kering dengan luas peruntukan sebesar 43.618,64 atau 13,28 persen, sedangkan berikutnya adalah peruntukan perumahan sebesar 34.561,10 atau 10,49 persen dari total penggunaan lahan keseluruhan.
- b) Selama periode 2005-2008 tingkat konversi lahan pertanian ke non pertanian sebesar 197,55 ha, atau 65,85 ha/tahun.
- c) Berdasarkan hasil perhitungan memperlihatkan bahwa Kecamatan Kaliwates dan Patrang merupakan kecamatan dengan tingkat konversi lahan pertanian sangat tinggi. Kecamatan dengan tingkat konversi yang tinggi adalah Kecamatan Sumbersari dan Pakusari. Sedangkan kecamatan dengan tingkat konversi cukup tinggi, antara lain: Kecamatan Puger, Ambulu, Silo, Ajung, Tanggul, dan Bangsalsari.
- d) Berdasarkan hasil perhitungan memperlihatkan bahwa Kecamatan Puger, Kaliwates dan Sumbersari merupakan kecamatan dengan peningkatan areal perumahan sangat tinggi. Kecamatan dengan peningkatan areal perumahan yang tinggi adalah Kecamatan Patrang dan Pakusari. Sedangkan kecamatan dengan

peningkatan areal perumahan cukup tinggi, antara lain: Kecamatan Tanggul, Bangsalsari, Arjasa, Ajung dan Ambulu.

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini maka saran yang disampaikan untuk mengurangi laju terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian, beberapa langkah yang dapat dilakukan, diantaranya:

- a) Perlu dilakukan penataan peruntukan lahan yang lebih jelas dan tegas, dengan melakukan revisi rencana tata ruang wilayah sesuai dengan perkembangan peruntukan lahan saat ini.
- b) Perlu diterbitkan aturan yang transparan dan adil terhadap semua pihak yang melakukan perubahan peruntukan lahan.
- c) Perlu dikembangkan pertanian yang lebih modern, agar mampu meningkatkan produktivitas lahan, sehingga peralihan peruntukan (konversi) pertanian ke non pertanian dengan sendirinya akan berkurang.

Referensi

- Azis, Iwan Jaya. 1987. *Konsep Ruang untuk Ilmu Ekonomi: Suatu Pendekatan dalam Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- . 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: LPFE-UI.
- Badan Litbang Pertanian 1994, *Implikasi Kesepakatan GATT Terhadap Sektor Pertanian Di Indonesia* (Volume 1, Tinjauan Sektor) Jakarta
- Basri, Faisal Hasan. 1995. *Pembangunan Dilema dan Tantangan: Lima Puluh Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Erlangga
- BPS dan Bappeda Kabupaten Jember. 1997. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Doti II Jember Tahun 1995-1997*. Jember
- Budiharsono, S. 1989. *Perencanaan Pembangunan Wilayah: Teori, Model Perencanaan dan Penerapannya*. Jakarta: PAU Ekonomi UI.
- Budiman, Arief. 1996. *Teori Pembangunan Duita ke Tiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiono 1994. *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE-UGM
- Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Pedesaan, 1998, "Bahan Rapat Pimpinan,". Jakarta.

- Djoyohadikusumo, Sumitro. 1994. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES
- Erwidodo dan Hasan 1993 "Indonesian Dairy Industry: Problem and Policy Option, CPIS Jakarta
- Erwidodo dan Hasan, 1993, "Evaluasi Kebijaksanaan Industri Persusuan di Indonesia", JAE Vol 12 Bogor.
- Hoover, E. M. dan F. Giarratani, 1985, *An Introduction to Regional Economics*, Alfred A. Knopf, New York.
- Isard, Walter. 1975. *An Introduction to Regional Economic*. New Jersey : Prentice Hall
- Kadariah.1976. *Ilmu Ekonomi Perencanaan*. Jakarta. LPFE-UI
- Kristiadi, J.B. 1992. *Pembangunan Regional dan Permasalahannya*. Jakarta: Analisa CSIS
- Kompas, 7 Januari 1998: *Diskusi Pakar dan Laporan Tahunan Ekonomi*
- Moenek, Reydonnyzar. 1997. *Financing Local Government Throughout Greater Private Sektor Involvement In Indonesia : Current Thinking*. Chiang Mai Thailand. Makalah Seminar pada Forum Administrasi Daerah Lokal ASEAN
- Muljana, B.S. 1987. *Permasalahan Ruang dan Telaah Ekonomi Regional*: dalam Iwan Jaya Azis dan Hendra Esmara (ed). Jakarta: Gramedia
- Partadiredja, Ace. 1989. *Perhitungan Pendapatan Nasional*, Jakarta : LP3ES
- Prijambodo, Bambang. 1995. *New Growth Theory : Tinjauan Teoritis Singkat dan Implikasi Kebijaksanaannya*. Makalah Intern Bappenas
- Richardson, W.H, 1972, *Input-Output and Regional Economics*, John Wiley & Sons, New York.
- Sagir, Suharsono. 1999. *Makalah Pembekalan Teknis Identifikasi Potensi Daerah; Strategi Keuangan Daerah Tingkat II dalam Menghadapi Otonomi Daerah dan Era Persaingan Global*. Bandung. LPM ITB dan Dirjen PUOD Depdagri;
- Soedjatmoko,1992, *Pembangunan Berkelanjutan*., Jakarta : Gramedia Pustaka Utama dan Yayasan SPES
- Soekirno, S. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LPFE-UI

- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar dan IDEA
-, 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta. Gramedia
- Supranto, J. 1991. *Statistik Teori Dan Aplikasi*. Jakarta : Erlangga
- Sutomo, Slamet, 1995, *Kemiskinan dan Pembangunan Wilayah Analisis Sistem Neraca Sosial ekonomi*, Disertasi Program Pascasarjana IPB, Bogor.
- Young, Alwyn.1998. *Growth without Scale Effect*. Chicago. Journal of Political Economy: The University of Chicago

